



# RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Renja PD BPBD Kabupaten Balangan didasarkan pada pelaksanaan dan evaluasi Renja PD BPBD Kabupaten Balangan 2023 hingga triwulan II Tahun Anggaran 2023, prioritas RKPD Tahun 2023 dan Renstra BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Balangan pada tahun anggaran yang berjalan.

Demikian Perubahan Renja BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini disusun dengan harapan pembangunan di Kabupaten Balangan dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan..

**Paringin, 20 Juli 2023**

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH**



**H. RAHMI, S.H.I**

**Pembina / IVa**

**NIP. 19761107 198903 1 009**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023</b>	<b>5</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II	5
B. Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	6
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>19</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>31</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut Kabupaten Balangan telah menyusun RPJP dan RPJM Kabupaten Balangan. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Balangan. Renstra BPBD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif..

Dokumen akhir dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Perubahan Renja BPBD Kabupaten Balangan tahun 2023 disusun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah. Perubahan Renja dilakukan untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

### **B. Landasan hukum**

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kaliman Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265 ) ;

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221 );
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomo33 Tahun 2021Tentang Standar Satuan Harga Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembanguna Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Renca Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022.
  20. Kepmendagri 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
  23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
  24. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
  25. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Balangan berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun anggaran berjalan, evaluasi pencapaian target Renstra, usulan masyarakat/ pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah untuk :

- 1) Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- 2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- 3) Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- 4) Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- 5) Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Balangan sampai Triwulan II Tahun 2023
- B. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD**

##### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan**  
**triwulan II**

Evaluasi terhadap hasil rencana kerja bermaksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menilai dan memastikan bahwa target dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan sasaran RPJMD 2021-2026 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2023.

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, penyerapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II masih dengan serapan rendah yaitu Rp. 4.516.623.088,- atau 35,01 % dari Pagu Anggaran Rp. 12.900.129.553,-. Evaluasi terhadap beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan serapan anggaran rendah dan belum terserap adalah sebagai berikut :

- a. Pergantian Pejabat yang baru selaku PPTK Sub Kegiatan
- b. Masih terdapat proses pengadaan barang/jasa terutama jasa konstruksi yang masih dalam tahap proses kontrak
- c. Pokir dan Hibah

Pada pelaksanaan pengadaan belanja Pokir dan Hibah triwulan II masih ada yang belum terlaksana secara keseluruhan sehingga pencapaian kinerja pada sub kegiatan yang termuat belanja pokir dan hibah tidak bisa maksimal, ini dikarenakan masih ada miss komunikasi antara penerima hibah dan BPBD

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II, maka perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga target kinerja tercapai yaitu :

- a. Menyusun perencanaan dan penganggaran kembali dan diusulkan untuk perubahan anggaran tahun berjalan.
- b. Mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada dalam rangka pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
- c. Melaksanakan evaluasi pada aktivitas kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
- d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar tercapai target kinerja.

Adapun rincian target kinerja dari realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.1 berikut

a. Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Table 2.1

Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 s/d Triwulan II

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%			
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100%	48.055.349.274	100%	5.401.851.602	100%	6.918.000.303	50%	2.964.965.913	50	42,86	150%	8.366.817.515,00	150	17,41
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	1.053.888.157	5 dokumen	86.460.000	5 dokumen	173.159.200	4 dokumen	50.001.600	80	28,88	9 dokumen	136.461.600,00	180	12,95
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.339.600	0 Dokumen	0	4 Dokumen	21.339.600	3 Dokumen	16.101.600	75	75,45	3 Dokumen	16.101.600,00	75	75,45
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	600.000	100	10	1 Dokumen	600.000,00	100	10
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.026.548.557	1 Laporan	86.460.000	1 Laporan	145.819.600	1 Laporan	33.300.000	100	22,84	2 Laporan	119.760.000,00	200	11,67
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat kelancaran pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	19.100.412.693	100%	3.221.815.222	100%	4.473.170.155	50%	2.403.842.597	50	53,74	150%	5.625.657.819,00	150	29,45
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	18.782.607.230	12 Orang/Bulan	3.201.815.222	14 Orang/Bulan	4.418.570.155	6 Orang/Bulan	2.398.442.597	42,86	54,28	18 Orang/Bulan	5.600.257.819,00	128,57	29,82
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	64.608.960	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	3.000.000,00	100	4,64
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	2 Laporan	253.196.503	2 Laporan	17.000.000	2 Laporan	44.600.000	1 Laporan	5.400.000	50	12,11	3 Laporan	22.400.000,00	150	8,85
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	100%	658.275.365	100%	255.753.225	100%	317.378.000	50%	110.030.000	50	34,67	150%	365.783.225,00	150	55,57
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah Paket Pakaiannya beserta Atribut Kelengkapannya	46 Paket	86.379.670	46 Paket	21.700.000	46 Paket	45.000.000	46 Paket	37.200.000	100	82,67	92 Paket	58.900.000,00	200	68,19
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	571.895.695	20 Orang	234.053.225	30 Orang	272.378.000	19 Orang	72.630.000	63,33	26,74	39 Orang	306.883.225,00	130	53,66

1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	2.267.983.342	100%	521.505.779	100%	486.803.100	50%	214.535.499	50	44,07	50%	214.535.499,00	50	9,46
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	117.923.882	12 paket	13.941.600	12 paket	13.275.100	6 paket	5.814.000	50	43,8	18 paket	19.755.600,00	150	16,75
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	1.088.506.757	5 Paket	254.423.000	5 Paket	222.978.900	2 Paket	17.346.600	40	7,78	7 Paket	271.775.600,00	140	24,37
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	154.521.643	12 Paket	29.361.150	12 Paket	44.045.300	6 Paket	12.695.700	50	28,82	18 Paket	42.056.850,00	150	27,22
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	155.246.435	12 Dokumen	15.600.000	12 Dokumen	11.995.200	6 Dokumen	4.340.000	50	36,18	18 Dokumen	19.940.000,00	150	12,84
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	751.784.625	25 Laporan	208.174.029	25 Laporan	194.508.600	21 Laporan	174.339.199	84	89,63	46 Laporan	382.513.228,00	184	50,88
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pengadaan barang / aset yang diadakan	12 Bulan	0	12 Bulan	223.316.000	12 Bulan	424.845.300	6 Bulan	0	50	0	18 Bulan	223.316.000,00	150	0
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	223.316.000	1 Unit	424.845.300	0 Unit	0	0	0	1 Unit	223.316.000,00	100	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	3.512.167.470	100%	236.761.993	100%	419.365.260	50%	107.542.057	50	25,64	150%	344.304.050,00	150	9,8
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.958.080.047	12 Laporan	81.720.000	12 Laporan	193.383.600	6 Laporan	34.370.000	50	17,77	18 Laporan	116.090.000,00	150	5,93
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.083.527.750	12 Laporan	105.595.113	12 Laporan	125.795.000	6 Laporan	61.180.417	50	48,64	18 Laporan	166.775.530,00	150	15,39
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	470.559.673	12 Laporan	49.446.880	12 Laporan	100.186.660	6 Laporan	11.991.640	50	11,97	18 Laporan	61.438.520,00	150	13,06

1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Jasa Perkantoran	100%	21.462.622.247	100%	856.239.383	100%	623.279.288	50%	79.014.160	50	12,68	150%	935.253.543,00	150	4,36
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	20.496.534.488	15 Unit	249.952.383	15 Unit	298.628.488	5 Unit	48.894.160	33,33	16,37	20 Unit	298.846.543,00	133,33	1,46
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	114.997.675	12 Unit	8.240.000	12 Unit	16.000.000	0 Unit	0	0	0	12 Unit	8.240.000,00	100	7,17
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	1 Unit	223.166.000	3 Unit	168.680.000	0 Unit	0	0	0	1 Unit	223.166.000,00	33,33	0
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	851.090.084	20 Unit	374.881.000	20 Unit	139.970.800	10 Unit	30.120.000	50	21,52	30 Unit	405.001.000,00	150	47,59
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan</b>	<b>100%</b>	<b>473.596.427.183</b>	<b>100%</b>	<b>5.128.481.904</b>	<b>100%</b>	<b>4.940.440.850</b>	<b>50%</b>	<b>1.450.861.175</b>	<b>50</b>	<b>29,37</b>	<b>150%</b>	<b>6.579.343.079,00</b>	<b>150</b>	<b>1,39</b>
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80 Desa	84.663.364.338	80 Desa	1.633.146.000	80 Desa	854.390.000	120 Desa	527.608.506	150	61,75	200 Desa	2.160.754.506,00	250	2,55
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	44.316.682.169	1 Dokumen	828.881.000	1 Dokumen	109.450.000	1 Dokumen	26.638.506	100	24,34	2 Dokumen	855.519.506,00	200	1,93
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	400 Orang	40.346.682.169	400 Orang	804.265.000	400 Orang	744.940.000	550 Orang	500.970.000	137,5	67,25	950 Orang	1.305.235.000,00	237,5	3,24

1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya Aparatur Yang menangani sub urusan bencana dan warga yang berada dikawasan rawan bencana	100%	275.643.443.975	100%	3.242.804.807	100%	3.485.150.850	50%	879.310.669	50	25,23	50%	879.310.669,00	50	0,32
1.05.03.2.02.04	Pengediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	138.573.800.864	1 Unit	1.680.568.251	5 Unit	1.456.864.250	5 Unit	343.372.263	100	23,57	6 Unit	2.023.940.514,00	120	1,46
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	44.316.682.169	1 Dokumen	24.616.000	1 Dokumen	109.450.000	0 Dokumen	12.744.000	0	11,64	1 Dokumen	37.360.000,00	100	0,08
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	79.241.509.959	100%	225.536.400	100%	523.585.400	0%	75.306.906	0	14,38	100%	300.843.306,00	100	0,38
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	90 Orang	13.364.246.383	90 Orang	1.312.084.156	90 Orang	1.248.046.600	0 Orang	447.887.500	0	35,89	90 Orang	1.759.971.656,00	100	13,17
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	147.204.600	0 Orang	0	100 Orang	147.204.600	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 paket	113.289.618.870	50 paket	252.531.097	50 paket	600.900.000	10 paket	43.942.000	20	7,31	60 paket	296.473.097,00	120	0,26
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	91.100.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	91.100.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0
1.05.03.2.03.04	Pengediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 orang	113.198.518.870	50 orang	252.531.097	50 orang	509.800.000	10 orang	43.942.000	20	8,62	60 orang	296.473.097,00	120	0,26
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON</b>	<b>Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>169.210.887.880</b>	<b>100%</b>	<b>571.450.175</b>	<b>100%</b>	<b>1.113.564.800</b>	<b>50%</b>	<b>85.676.000</b>	<b>50</b>	<b>7,69</b>	<b>150%</b>	<b>657.126.175,00</b>	<b>150</b>	<b>0,39</b>
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	162.376.895.580	15 Kegiatan	459.111.175	15 Kegiatan	1.000.121.300	11 Kegiatan	65.176.000	73,33	6,52	26 Kegiatan	524.287.175,00	173,33	0,32
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	162.376.895.580	15 Laporan	459.111.175	15 Laporan	1.000.121.300	11 Laporan	65.176.000	73,33	6,52	26 Laporan	524.287.175,00	173,33	0,32
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	200 Orang	6.833.992.300	200 Orang	112.339.000	200 Orang	113.443.500	200 Orang	20.500.000	100	18,07	400 Orang	132.839.000,00	200	1,94
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi	200 Orang	6.833.992.300	200 Orang	112.339.000	200 Orang	113.443.500	200 Orang	20.500.000	100	18,07	400 Orang	132.839.000,00	200	1,94

Berdasarkan table diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 mencakup 3 (tiga) Program 12 (dua belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategi.

Uraian selengkapannya capaian kinerja perindikator sampai bulan Juni 2023 sebagai berikut:

**i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pagu Anggaran Rp. 145.819.600,- realisasi sebesar Rp. 50.001.600,- dari pagu anggaran 95.818.000,- dengan perincian :

1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu sebesar Rp.21.339.600,- dan Realisasi Rp.16.101.600,- dari pagu anggaran sebesar Rp.5.238.000,-.

2) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp.6.000.000,- dan Realisasi Rp.600.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.5.400.000,-.

3) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pagu sebesar Rp.118.480.000,- dan Realisasi Rp.33.300.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.85.180.000,-.

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pagu Anggaran Rp. 4.475.370.155,- realisasi sebesar Rp. 2.403.842.597,- dari pagu anggaran 2.071.527.558,- dengan perincian

1) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pagu sebesar Rp.4.418.570.155,- dan Realisasi Rp.2.398.442.597,- dari pagu anggaran sebesar Rp.2.020.127.558,-.

2) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pagu sebesar Rp.10.000.000,- dan Realisasi Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,-.

3) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Pagu sebesar Rp.46.800.000,- dan Realisasi Rp.5.400.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.41.400.000,-.

**c. *Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah***

Pagu Anggaran Rp. 317.378.000,- realisasi sebesar Rp. 117.890.000,- dari pagu anggaran 199.488.000,- dengan perincian

1) *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pagu sebesar Rp.45.000.000,- dan Realisasi Rp.37.200.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.7.800.000,-.

2) *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pagu sebesar Rp.272.378.000,- dan Realisasi Rp.80.690.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.191.688.000,-.

**d. *Admistrasi Umum Perangkat Daerah***

Pagu Anggaran Rp. 486.803.100,- realisasi sebesar Rp. 214.535.499,- dari pagu anggaran 272.267.601,- dengan perincian

1) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*

Pagu anggaran untuk sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu sebesar Rp.13.275.100,- dan Realisasi Rp.5.814.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.7.461.100,-.

2) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu sebesar Rp.222.978900,- dan Realisasi Rp.17.346.600,- dari pagu anggaran sebesar Rp.205.632.300,-.

3) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pagu sebesar Rp.44.045.300,- dan Realisasi Rp.12.695.700,- dari pagu anggaran sebesar Rp.31.349.600,-.

4) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pagu sebesar Rp.11.995.200,- dan Realisasi Rp.4.340.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.7.655.200,-.

5) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu sebesar Rp.194.508.600,- dan Realisasi Rp.174.339.199,- dari pagu anggaran sebesar Rp.20.169.401,-.

**e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Pagu Anggaran Rp. 424.845.300,- realisasi sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran 424.845.300,- dengan rincian

1) *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pagu sebesar Rp.0,- dan Realisasi Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp.0,-.

2) *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pagu sebesar Rp.424.845.300,- dan Realisasi Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 424.845.300,-.

**f. *Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Pagu Anggaran Rp. 419.365.260,- realisasi sebesar Rp. 107.542.057,- dari pagu anggaran 311.823.203,- dengan perincian

1) *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pagu sebesar Rp. 193.383.600 dan Realisasi Rp. 34.370.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 159.013.600,-.

2) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pagu sebesar Rp. 125.795.000,- dan Realisasi Rp. 61.180.417,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 64.614.583,-.

3) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu sebesar Rp. 100.186.660,- dan Realisasi Rp.11.991.640,- dari pagu anggaran sebesar Rp.88.195.020,-.

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu Anggaran Rp. 623.279.288,- realisasi sebesar Rp. 79.014.160,- dari pagu anggaran 544.265.128,- dengan rincian

1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pagu sebesar Rp. 298.628.488,- dan Realisasi Rp.48.894.160,- dari pagu anggaran sebesar Rp.249.743.328,-.

2) *Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya Pagu sebesar Rp. 16.000.000,- dan Realisasi Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.000.000,-.

3) *Pemeriharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pemeriharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pagu sebesar Rp. 168.680.000,- dan Realisasi Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 168.680.000,-.

4) *Pemeriharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pemeriharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pagu sebesar Rp.

139.970.800,- dan Realisasi Rp.30.120.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 109.850.800,-.

## **ii. Program Penanggulangan Bencana Daerah**

### **1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

Pagu Anggaran Rp. 4.893.704.050,- realisasi sebesar Rp. 1.450.861.175,- dari pagu anggaran 3.442.842.875,- dengan rincian

#### **1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota Pagu sebesar Rp. 109.450.000,- dan Realisasi Rp.26.638.506,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 82.811.494,-.

#### **2) Sosialisai,Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Sosialisai,Komunikasi,Informasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Pagu sebesar Rp. 744.940.000,- dan Realisasi Rp.500.970.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 243.970.000,-.

### **2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Pagu Anggaran Rp. 3.438.414.050,- realisasi sebesar Rp. 879.310.669,- dari pagu anggaran 2.559.103.381,- dengan rincian

#### **1) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pagu sebesar Rp. 1.456.864.250,- dan Realisasi Rp.343.372.263,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.113.491.987,-

#### **2) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Pagu sebesar Rp. 62.713.200,- dan Realisasi Rp.12.744.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 49.969.200,-.

#### **3) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Pagu sebesar Rp. 523.585.400,- dan Realisasi Rp.75.306.906 dari pagu anggaran sebesar Rp. 448.278.494,-.

**4) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran untuk sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Pagu sebesar Rp. 1.248.046.600,- dan Realisasi Rp.447.887.500 dari pagu anggaran sebesar Rp.800.159.100,-

**5) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pagu sebesar Rp. 147.204.600,- dan Realisasi Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 147.204.600,-.

**3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Pagu Anggaran Rp. 600.900.000,- realisasi sebesar Rp. 43.942.000,- dari pagu anggaran 556.958.000,- dengan rincian

**1) respon Cepat Darurat bencana Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan respon Cepat Darurat bencana Kabupaten/Kota Pagu sebesar Rp. 91.100.000,- dan Realisasi Rp.0,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 91.100.000,-.

**2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Pagu sebesar Rp. 509.800.000,- dan Realisasi Rp.43.942.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 465.858.000,-.

**iii. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

**1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Pagu Anggaran Rp. 1.000.121.300,- realisasi sebesar Rp. 65.176.000,- dari pagu anggaran 934.945.300,- dengan rincian

**1) Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pagu sebesar Rp. 1.000.121.300,- dan Realisasi Rp. 65.176.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 934.945.300,-.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

Pagu Anggaran Rp. 113.443.500,- realisasi sebesar Rp. 20.500.000,- dari pagu anggaran 92.943.500,- dengan rincian

### **1) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat***

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pagu sebesar Rp. 113.443.500,- dan Realisasi Rp20.500.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 92.943.500,-.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD**

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2014, BPBD Kabupaten Balangan pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Balangan maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Balangan harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah :

1. Belum maksimalnya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pra, tanggap darurat maupun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.
2. Masih terbatasnya sarana prasarana PB seperti peralatan penanggulangan bencana, logistik, material kebencanaan yang lainnya
3. Banyaknya desa yang termasuk daerah rawan bencana sedangkan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di wilayah Kabupaten Balangan sangat terbatas.
4. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan.
5. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Balangan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan memperbaiki system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Berdasarkan hasil capaian TW II yang tertuang dalam laporan E-Monev SKPD dapat disimpulkan bahwa untuk capaian IKU BPBD masih dalam tahap pelaksanaan guna mencapai target yang diharapkan walaupun pada halnya target yang sudah ditetapkan pada rencana strategis telah tercapai dan bahkan telah melampaui dari target. Pada Triwulan II ini capaian kinerja masih di bawah 50% hal ini dikarenakan kejadian bencana dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun tidak banyak terjadi sehingga anggaran penanganan kebencanaan tidak terserap, selain itu juga serapan anggaran dan capaian kinerja yang ada terlaksana dengan keiatan Pelayanan informasi kebencanaan.

Untuk pencapaian SPM sampai dengan triwulan II untuk kegiatan

1. Pelayanan informasi rawan bencana telah mencapai target kinerja sebesar 40% dengan rincian kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang kebencanaan
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana belum terlaksana secara maksimal
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana juga belum terlaksana secara maksimal

4. Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sampai dengan triwulan II berdasarkan kejadian kebakaran ada 4 kejadian



### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sampai dengan Triwulan II dapat diketahui perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut

- a. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
  1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan
  2. Program Penanggulangan Bencana - Terdiri dari 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan
  3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran – Terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan

b. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Jumlah kebutuhan dana yang diakomodir dalam Renja Perubahan BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah Rp. 18.110.949.845,- sehingga total pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 31.011.079.389,-. Penambahan pagu indikatif dialokasikan pada Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota yang akan digunakan untuk Pengadaan Unit Damkar dan Mesin Alkon.

c. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan antar kode rekening.

Dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, kebutuhan dan prioritas. Dari hasil evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II, sub kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
20. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
21. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
22. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
23. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
24. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
25. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
26. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
27. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
28. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
29. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Adapun rincian perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan, target dan pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022 Tabel. 3.1 RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2023**

KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN BALANGAN										
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
No	Urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Pagu		Alasan	
		SEMULA	MENJADI		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan						12.900.129.553	31.011.079.398	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
2	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	6.892.860.703	8.432.293.148		
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	21.339.600	108.498.400	Biaya Operasional koordinasi	
4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000		
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	118.480.000	121.642.000	Penyesuaian gaji untuk perbaikan kekurangan gaji honor tenaga kontrak	

6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat kelancaran pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	100%	4.475.370.155	4.640.575.388	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	4.418.570.155	4.614.535.388	Penambahan untuk belanja gaji dan TPP karena anggaran yang ada belum mengakomodir pembayaran gaji dan TPP ASN Untuk satu tahun
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.000.000	berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan?semesteran SKPD dan Lap[oran Koordinasi Penyusun Laporan Keunagan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	46.800.000	24.040.000	berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir

10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	100%	100%	317.378.000	421.077.100	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 Paket	46 Paket	45.000.000	53.499.100	bertambah karena ada pengadaan baju khusus untuk atasan
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	272.378.000	367.578.000	bertambah untuk operasional bimtek
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	100%	486.803.100	1.121.738.000	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	13.275.100	13.275.100	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	222.978.900	502.122.200	bertambah untuk pengadaan peralatan penunjang kegiatan kantor
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	44.045.300	52.486.900	bertambah untuk penambahan pengadaan ATK Kantor
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.995.200	11.995.200	

18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan		194.508.600	541.858.600	bertambah untuk mengakomodir biaya operasional koordinasi lintas sektor
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang / aset yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan		424.845.300	824.514.300	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0			0	375.000.000	pengadaan unit operasional kantor yang kurang layak
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		424.845.300	449.514.300	pengadaan parkir dan gudang logistik yang belum tersedia
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%		419.365.260	377.024.760	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		193.383.600	112.907.600	berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir

23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.795.000	167.998.000	bertambah karena kurang anggaran untuk biaya bulanan PDAM
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.186.660	96.119.160	berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Jasa Perkantoran	100%	100%	623.279.288	811.223.200	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	298.628.488	264.682.800	
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	16.000.000	16.000.000	
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dDipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	168.680.000	382.249.600	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	139.970.800	148.290.800	

30	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
						4.893.704.050	6.141.272.450	
31	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80 Desa	80 Desa	854.390.000	827.634.000	
32	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	109.450.000	97.000.000	berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir
33	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	400 Orang	400 Orang	744.940.000	730.634.000	berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir
34	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya Aparatur Yang menangani sub urusan bencana dan warga yang berada dikawasan rawan bencana	100%	100%	3.438.414.050	4.818.379.750	
35	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralataan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	5 Unit	1.456.864.250	2.768.380.100	bertambah dalam hal urusan pengadaan hibah dan pokir di anggaran 2023
36	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	62.713.200	62.713.050	
37	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	523.585.400	523.585.400	

38	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pesonil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	90 Orang	90 Orang	1.248.046.600	1.307.046.600	Penyesuaian gaji untuk perbaikan kekurangan gaji honor tenaga kontrak
39	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	100 Orang	147.204.600	156.654.600	bertambah untuk mengakomodir biaya operasional peserta apel siaga bencana
40	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 paket	50 paket	600.900.000	495.258.700	
41	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	91.100.000	47.159.000	berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir
42	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 orang	50 orang	509.800.000	448.099.700	berkurang karena masih menggunakan buffer stock barang logistik pada tahun 2022

43	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
						1.113.564.800	16.437.513.800	
44	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	15 Kegiatan			
						1.000.121.300	16.339.181.300	
45	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	15 Laporan			Bertambah sebagai pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam pengadaan unit damkar dan mesin alkon pemadam api
						1.000.121.300	16.339.181.300	
46	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	200 Orang	200 Orang			
						113.443.500	98.332.500	
47	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	200 Orang			berkurang untuk menutupi sub kegiatan lain yang belum terakomodir
						113.443.500	98.332.500	





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Balangan yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Renja Perubahan juga memperhatikan prioritas, kebutuhan dan efisiensi sehingga Perangkat Daerah (PD) akan tepat sasaran dalam menjalankan program kegiatan pada sisa tahun anggaran sesuai dengan rencana kerja. Arah kebijakan BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPBD dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Melalui Renja Perubahan BPBD, diharapkan seluruh target yang akan dicapai pada tahun 2023 dapat secara optimal tercapai, sehingga tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Probolinggo secara bertahap akan terwujud. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPBD tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPBD Kabupaten Balangan serta peran aktif stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Balangan,            Juli 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**H. RAHMI, S.H.I**  
**NIP. 19780912 200604 1 008**